



---

## **ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PANGAN**

**Audi Rahmatika**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Nuraini Dwiyanti**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Atikah Nurul Huda**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Anas Malik**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35131

Korespondensi penulis: [audirahmatika9@gmail.com](mailto:audirahmatika9@gmail.com)

**Abstract:** *Poverty and food inequality are problems that must be minimized because the economic growth of a country can be reflected through the poverty level and food security of its people. Government policies can be reflected in various dimensions of public life, such as the state, society, and the public interest. poverty and food inequality are still problems faced by Indonesia. Poverty is not only an economic problem, but also has an impact on various aspects of life. This research uses library research sourced from books and journals. Poverty alleviation is an effort to lift people out of poverty permanently. These efforts can be done through various actions, both economic and humanitarian. With the role of the government in overcoming poverty, it can greatly impact the economy in Indonesia, besides the government, the community also plays a very important role in poverty alleviation.*

**Keywords:** *Government Policy, Poverty, Food Security*

**Abstrak:** Kemiskinan dan ketimpangan pangan merupakan masalah yang harus diminimalisir karna pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat tercermin melalui tingkat kemiskinan serta ketahanan pangan atas masyarakatnya. Kebijakan pemerintah dapat tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan publik, seperti negara, masyarakat, dan kepentingan umum. kemiskinan dan ketimpangan pangan masih menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku dan jurnal. Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan. Dengan adanya peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dapat sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia, selain pemerintah masyarakat juga sangat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah, Kemiskinan, Ketahanan Pangan.*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang masih dihadapi Indonesia, di beberapa daerah banyak terdapat masyarakat yang hidupnya masih dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS dalam tahun 2023 Indonesia menududuki ngka 9,36% kemiskinan. Adapun permasalahan yang terjadi disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, kemudian adanya inflansi yang dapat menyebabkan faktor terjadinya kemiskinan,

rendahnya Pendidikan juga sangat berpengaruh dalam kemiskinan, minimnya ilmu yang didapatkan seseorang sangat berpengaruh dalam penyebab kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan pangan merupakan isu yang saling terkait dan menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan dapat menyebabkan ketidak mampuan untuk mengakses pangan yang cukup dan bergizi, sedangkan ketahanan pangan yang rendah dapat memperparah kondisi kemiskinan.

Indonesia merupakan negara dengan garis kemiskinan terbesar yang disebabkan kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Kemiskinan dapat menyebabkan keterbatasan dalam mengonsumsi pangan, masyarakat miskin sering tinggal di daerah terpencil atau perkotaan kumuh, sehingga akses terhadap pangan yang aman dan bergizi terbatas. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti: meningkatnya angka kriminalitas, kesehatan terganggu, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan.

Pemerintah Sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan dapat menciptakan suatu kebijakan yang dapat menanggulangi permasalahan ketimpangan pangan serta kemiskinan yang ada di Indonesia. Terdapat dua keadaan yang dapat menimbulkan kemiskinan terjal yaitu, kemiskinan neutral dan kemiskinan buatan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang berupaya dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pangan atas warganya. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengentaskan masalah ini yaitu dengan menerbitkan adanya kebijakan – kebijakan melalui perundang – undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pangan dalam suatu program – program yang akan dilaksanakan. Sebagaimana pada masa pemerintahan Jokowi-dodo adanya program Nawacita yang berisi tentang 9 prioritas pembangunan, dimana terdapat 2 program Nawacita yang mendukung pada pengentasan kemiskinan, yaitu : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui program Indonesia pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan program Indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Untuk memenuhi ketahanan pangan dalam solusi pengurangan kemiskinan, pemerintah dapat menggalakkan program yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan. Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, pemerintah telah meningkatkan kapasitas penyimpanan, distribusi yang efisien, dan manajemen stok pangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan impor dengan upaya-upaya yang lebih kuat untuk mendukung produksi pangan lokal agar dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah merupakan sumber utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Kebijakan Pemerintah**

Mc Rae dan Wilde mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai ”Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

B.R.S.Parker Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau respons terhadap suatu keadaan krisis".

Kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat pada suatu waktu tertentu. Kebijakan ini tidak hanya bersifat responsif terhadap situasi kritis yang muncul, tetapi juga bersifat preventif dalam upaya menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu contoh konkret kebijakan pemerintah adalah program pembangunan rumah murah atau rumah sederhana yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Program ini dirancang untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan perumahan, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kebutuhan akan hunian yang tinggi. Dengan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, pemerintah tidak hanya memberikan solusi jangka pendek bagi individu atau keluarga yang membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak atas perumahan yang layak.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang dirancang secara legal dan dialokasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat guna mengatasi masalah-masalah yang ada dan mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, serta dinamika sosial-politik yang ada. Dalam implementasinya, kebijakan pemerintah harus bersifat inklusif, adil, dan efisien agar mampu memberikan dampak yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

## 2. Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang mencakup kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kebutuhan makanan meliputi asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan produktivitas, sementara kebutuhan non-makanan mencakup berbagai kebutuhan dasar lainnya seperti tempat tinggal yang layak, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pakaian, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik. Kemiskinan bukan hanya tentang tidak adanya pendapatan yang memadai, tetapi juga tentang keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum.

Lebih lanjut, kemiskinan juga dapat dilihat dari sudut pandang **ketimpangan sosial**, yaitu situasi di mana meskipun seseorang atau keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, kondisi mereka tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup masyarakat sekitarnya. Ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang semakin dalam, di mana kelompok masyarakat miskin merasa terpinggirkan karena akses mereka terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik lebih terbatas dibandingkan dengan kelompok yang lebih sejahtera. Ketimpangan sosial ini sering kali

memperparah siklus kemiskinan, karena orang yang hidup di bawah standar sosial cenderung memiliki peluang yang lebih kecil untuk keluar dari kemiskinan, terutama jika mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, atau dukungan sosial yang memadai.

Secara keseluruhan, kemiskinan tidak hanya merupakan masalah ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang lebih kompleks, yang memerlukan intervensi menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang adil untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah, misalnya, dapat mengadopsi kebijakan yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

**a) Kemiskinan Absolute**

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok individu hidup di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar minimum. Kebutuhan dasar ini mencakup elemen-elemen penting untuk kelangsungan hidup, seperti makanan bergizi, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dalam konteks kemiskinan absolut, tingkat pendapatan seseorang dibandingkan langsung dengan jumlah pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendapatan minimum ini sering dihitung berdasarkan harga barang dan jasa yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas fisik. Kemiskinan absolut menyoroti kekurangan dalam akses terhadap sumber daya esensial yang mengancam kelangsungan hidup seseorang secara fisik.

Kondisi ini sering ditemukan di negara-negara berkembang, di mana sebagian besar penduduk menghadapi keterbatasan serius dalam hal akses terhadap kebutuhan pokok. Program-program sosial, seperti bantuan pangan, subsidi perumahan, dan program kesehatan gratis, sering kali dirancang untuk mengurangi kemiskinan absolut dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya minimum yang diperlukan untuk hidup secara layak.

**b) Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif, di sisi lain, adalah konsep yang melihat kemiskinan dalam konteks ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Seseorang dianggap miskin secara relatif ketika, meskipun mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tingkat kesejahteraannya masih jauh di bawah standar hidup rata-rata masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, kemiskinan relatif tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, individu yang tinggal di lingkungan perkotaan dengan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak dapat dianggap miskin secara relatif, meskipun mereka memiliki tempat tinggal dan makanan yang cukup.

Kemiskinan relatif mencerminkan kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, di mana kelompok tertentu menikmati tingkat kesejahteraan yang jauh

lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Ketimpangan ini sering kali menimbulkan perasaan marginalisasi dan ketidakadilan sosial, yang pada gilirannya dapat memicu masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan relatif, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan melalui program redistribusi, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan pengembangan infrastruktur di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

BAPPENAS (2004) dalam Anonimous (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

**Menurut Bank Dunia (2003) dalam Anonimous ( 2005) bahwa penyebab dasar kemiskinan adalah:**

- 1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
- 2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- 3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
- 4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
- 5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi;
- 6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
- 7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- 8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); dan
- 9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dandidak berwawasan lingkungan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat penting karena memiliki dampak luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya menyebabkan penderitaan individu, tetapi juga dapat menjadi akar dari berbagai masalah sosial lainnya, seperti meningkatnya tingkat kejahatan, penyebaran penyakit, dan ketidakstabilan sosial. Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja, yang pada akhirnya memperparah siklus kemiskinan. Dalam beberapa kasus ekstrem, kemiskinan bahkan dapat menyebabkan ketergantungan pada pihak luar, yang berpotensi membuka jalan bagi bentuk-bentuk penajahan modern, baik secara ekonomi maupun politik.

Lebih jauh lagi, kemiskinan memiliki hubungan erat dengan **ketahanan pangan**. Ketahanan pangan merujuk pada kemampuan individu atau masyarakat untuk mendapatkan akses yang cukup terhadap makanan yang bergizi dan aman secara berkelanjutan. Dalam banyak situasi, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami ketidakpastian dalam memperoleh makanan yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini memperburuk masalah kesehatan, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan, yang dapat mengalami malnutrisi dan gangguan perkembangan.

Kemiskinan dan ketahanan pangan adalah isu yang saling terkait dan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan, kualitas hidup menurun, produktivitas kerja berkurang, dan kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan semakin sulit dicapai. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus disertai dengan strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, seperti melalui pemberdayaan petani lokal, peningkatan akses terhadap teknologi pertanian, serta kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata.

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa menyelesaikan kedua isu ini secara simultan. Pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan mandiri.

### **3. Ketahanan Pangan**

Konsep ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasar konsep tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (food security), yang harus diperhatikan (Sumardjo, 2006):

- 1) Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu.
- 2) Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup.
- 3) Ketersediaan pangan mencakup aspek kecukupan jumlah pangan (food sufficiency) dan terjamin mutunya (food quality).
- 4) Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
- 5) Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
- 6) Keamanan pangan (food safety) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia.
- 7) Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya.
- 8) Prinsip pemerataan pangan mengamanatkan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali. Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan

Konsep ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 menekankan pentingnya terpenuhinya kebutuhan pangan secara holistik, baik dalam hal kuantitas, kualitas, keamanan, pemerataan, maupun keterjangkauan. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga menyangkut distribusi yang adil dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya pada tingkat rumah tangga sebagai unit terkecil. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak atas pangan bagi setiap warganya, memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang terpinggirkan dalam sistem pangan nasional.

Prinsip-prinsip seperti produksi pangan yang efisien, pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta sistem distribusi yang merata dan adil menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, keterjangkauan pangan menjadi dimensi keadilan sosial yang krusial, mengingat akses terhadap pangan yang layak merupakan hak dasar setiap individu.

Jadi, ketahanan pangan adalah fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan yang memerlukan pendekatan terpadu. Pemerintah, produsen, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan bahwa pangan tersedia, aman, terjangkau, dan didistribusikan secara adil, sehingga dapat menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan metode study pustaka yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai literatur mengenai topik penelitian agar mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan **data sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Husein Umar, data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan kembali, baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk tabel, diagram, atau format lainnya yang memudahkan analisis lebih lanjut. Data sekunder ini memberikan dasar yang kuat untuk mendukung penelitian, terutama dalam kajian yang bersifat teoritis atau konseptual.

Penelitian ini dilakukan melalui **kajian pustaka**, yang memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah pada **kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pangan**. Dengan memanfaatkan data sekunder dan berbagai literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kebijakan pemerintah dalam menangani dua isu krusial tersebut, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah utama adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program bantuan sosial (bansos). Program ini mencakup berbagai bentuk, seperti bantuan tunai, bahan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya, yang ditujukan untuk meringankan beban hidup kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Pemerintah juga menjalankan program sosial berskala nasional, seperti **Program Keluarga Harapan (PKH)**, yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ada **Program Sembako**, yang bertujuan meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat miskin, serta **Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** berupa beras, yang didistribusikan untuk mengatasi kebutuhan mendesak dalam situasi krisis.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan upah yang layak. Pemerintah juga berfokus pada pengembangan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses ke layanan dasar.

Selain itu, pemerintah membentuk **Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK)** yang berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan serta program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Komite ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, sehingga langkah-langkah penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terarah dan efektif. Melalui kombinasi berbagai program dan kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengatasi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memberikan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adanya upaya serta bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam mengatasi kemiskinan seperti:

- a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
- b) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c) Mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui regionalisasi bantuan sosial.
- d) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- e) Membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
- f) Membangun budaya usaha.
- g) Membangun swadaya setempat.
- h) Menyediakan kebutuhan pokok.
- i) Membangun pemberdayaan kaum miskin.

Pemerintah memiliki berbagai kewajiban dalam mengatasi kemiskinan, yang tidak hanya terbatas pada kebijakan sosial, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi dan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa kewajiban penting yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah **menyusun kebijakan** yang pro-kemiskinan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, memberikan **bantuan sosial** yang tepat sasaran, serta **meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan** agar masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan yang setara dengan yang lain. Selain itu, pemerintah

juga harus memastikan **pembangunan infrastruktur** dan **prasarana pendukung desa** dilakukan secara merata di seluruh daerah, agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam aspek pembangunan.

Pentingnya kebijakan yang bersifat **preventif, represif, dan rehabilitatif** tidak dapat diabaikan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Kebijakan preventif akan berfokus pada upaya pencegahan, seperti memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kebijakan represif bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang sudah terjadi dengan memberikan bantuan sosial langsung, sementara kebijakan rehabilitatif berfokus pada pemulihan kondisi masyarakat yang sudah terpuruk, misalnya dengan membantu mereka bangkit dari krisis atau bencana. Semua kebijakan tersebut harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin dan rentan, serta mendorong **pemberdayaan masyarakat**.

Pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti **pengembangan keterampilan**, dukungan **modal usaha**, serta pengembangan **usaha kecil dan menengah (UKM)**. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pembukaan kesempatan kerja yang lebih luas, termasuk sektor-sektor yang berbasis pada keterampilan lokal dan tradisional, akan sangat mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif.

**Kemiskinan** dan **ketahanan pangan** saling terkait dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan. **Kemiskinan makro** sering kali dihitung berdasarkan **kebutuhan dasar**, termasuk kebutuhan pangan, yang merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, maka **ketahanan pangan** akan terganggu. Ketahanan pangan yang terganggu, pada gilirannya, dapat menyebabkan **ketidakstabilan ekonomi**, karena pasokan pangan yang tidak mencukupi akan menyebabkan harga pangan naik dan menyebabkan inflasi. Selain itu, ketidakstabilan pasokan pangan yang lebih sedikit dari permintaan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

## 2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan Pangan

Untuk memenuhi ketahanan pangan dalam solusi pengurangan kemiskinan, pemerintah dapat menggalakkan program yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan pemanfaatan pengembangan industri pangan lokal dapat membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pangan nasional. Selain itu, program ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha pangan lokal, mengidentifikasi lokasi penerima manfaat, yaitu lokasi yang memiliki potensi ketersediaan bahan baku dan pemasaran, membentuk tim teknis yang terdiri dari aparat dinas ketahanan pangan dan pakar dari perguruan tinggi, merancang produk olahan pangan lokal, memanfaatkan teknologi pengolahan pangan untuk menghasilkan tepung sebagai bahan baku industri pangan, mengembangkan skala usaha, menjamin kontinuitas bahan baku, menjamin pemasaran. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketahanan pangan dapat memberikan dampak positif, seperti:

- a) Meningkatkan kesejahteraan petani
- b) Menjaga stabilitas harga

- c) Menurunkan beban pengeluaran masyarakat
- d) Meningkatkan produktivitas lahan
- e) Meningkatkan penggunaan pupuk
- f) Meningkatkan ketersediaan pangan, seperti produk domestik, distribusi pangan, dan cadangan pangan
- g) Membangun hubungan yang harmonis antara budaya, struktur organisasi, sistem komunikasi, dan gaya kepemimpinan organisasi
- h) Melaksanakan program pengembangan lumbung pangan masyarakat
- i) Membuat dan menguatkan kebijakan-kebijakan otonomi pangan daerah
- j) Memberdayakan masyarakat dan petani Ketahanan pangan adalah keadaan di mana semua orang memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis karena tidak ada negara yang dapat berkembang secara stabil tanpa mencapai ketahanan pangan. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi dan gejolak sosial dan politik. Pertanian berkelanjutan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan melindungi lingkungan.

Beberapa praktik pertanian berkelanjutan yang bisa dilakukan, di antaranya: menggunakan pupuk organik dan hayati, mengelola hama dan penyakit terpadu (pht), mengkonservasi air dan tanah. Selain itu, urban farming juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di rumah tangga perkotaan. Peran petani sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan. Tanpa petani yang produktif, negara akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Namun, petani sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap sumber daya dan teknologi, harga input yang tinggi, dan ketidakpastian pasar. Untuk meningkatkan kondisi kerja petani, pemerintah dan lembaga internasional dapat memberikan dukungan, seperti akses terhadap teknologi yang tepat dan memastikan harga yang adil untuk produk pertanian mereka.

Dengan adanya kebijakan seperti ini menyebabkan impor beras dapat meningkatkan pendapatan petani padi dan kepastian usaha tani, kebijakan impor beras dapat menjaga stabilitas harga beras domestik, kebijakan pengendalian harga pangan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat. memberikan dukungan terhadap pasokan rantai makanan seperti melalui peningkatan produktivitas lahan. peningkatan subsidi pupuk berdampak positif meningkatkan penggunaan pupuk, produktivitas padi, produksi dan penawaran beras.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah juga dapat melakukan upaya lain untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti:

- a. Diversifikasi pangan, seperti mempromosikan produksi lokal jagung, singkong, dan sagu.
- b. Berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur pertanian, termasuk sistem irigasi, jalan tani, dan fasilitas penyimpanan.
- c. Mengatasi perubahan iklim.
- d. Mempromosikan keragaman pangan.
- e. Mengurangi pemborosan.
- f. Melakukan pelatihan dengan urban farming.

Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebijakan impor dan upaya yang lebih kuat untuk mendukung produksi pangan local agar dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan cara, menginvestasikan infrastruktur pertanian untuk mendukung

produksi pangan local, penelitian dan pengembangan teknologi pertanian untuk mendukung produksi pangan local, menerapkan kebijakan harga yang melindungi petani local dari dampak negatif produk impor, modernisasi irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kapasitas penyimpanan, distribusi yang efisien, serta pengelolaan stok pangan yang transparan dan akuntabel.

Impor pangan juga dapat membantu Indonesia mencapai ketahanan pangan, terutama dengan cara, memenuhi permintaan akan produk pangan tertentu, menstabilkan harga, menjembatani kekosongan sesaat, menjaga keragaman produk pangan, impor pangan dapat membantu Indonesia mencapai ketahanan pangan, asalkan kebijakan impor diimbangi dengan upaya mendukung produksi pangan local.

Namun, kebijakan impor yang tidak mendukung produksi dalam negeri dapat melemahkan sektor pertanian local. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerintah perlu menginvestasikan infrastruktur pertanian, mengembangkan teknologi pertanian, melindungi petani local dari dampak negatif produk impor, memodernisasi irigasi. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis karena tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa mencapai ketahanan pangan. Ketersediaan pangan yang lebih sedikit daripada permintaan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan gejala sosial dan politik.

Salah satu kebijakan impor yang dapat membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah dengan **menyederhanakan kebijakan non-tarif komoditas pangan**. Kebijakan ini bertujuan untuk **mengurangi penundaan akibat birokrasi**, yang sering kali memperlambat proses impor dan berdampak pada kelangkaan pasokan pangan. Dengan menyederhanakan prosedur administratif, impor dapat dilakukan lebih cepat, memastikan pasokan pangan yang lebih stabil di pasar domestik.

Selain itu, kebijakan ini dapat **menghilangkan peluang korupsi** yang sering terjadi dalam proses impor komoditas pangan, karena adanya pengurangan regulasi yang rumit dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang. **Peningkatan persaingan antar importir** juga menjadi manfaat lain dari kebijakan ini. Dengan mengurangi hambatan administratif, banyak pemain dalam sektor impor dapat terlibat, yang berpotensi untuk menurunkan harga pangan dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

Peningkatan persaingan antar importir diharapkan akan **meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan**, terutama bagi konsumen yang mendapatkan pangan dengan harga lebih terjangkau dan kualitas yang lebih baik. Dengan pasokan pangan yang stabil dan harga yang wajar, **kemiskinan** yang terkait dengan ketidakmampuan akses pangan dapat berkurang, dan ini berpotensi mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa **risiko**, di antaranya adalah **terbatasnya kemampuan importir kecil** untuk memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan. Hal ini berpotensi menyebabkan hanya beberapa **importir besar** yang dapat mengakses pasar, sehingga dapat memengaruhi distribusi pangan secara tidak merata dan menciptakan ketergantungan pada pihak-pihak tertentu.

Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan **perdagangan yang kompetitif** di mana tidak ada satu importir pun yang dapat mengendalikan stok dan harga pangan di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menerapkan **regulasi yang adil dan transparan**, serta memastikan akses yang lebih mudah bagi importir kecil dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas atau pelatihan untuk memenuhi standar administratif dan teknis yang berlaku. Hal ini akan memastikan pasokan pangan yang lebih merata dan lebih adil, yang

pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada beberapa importir besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kebijakan penyederhanaan impor non-tarif memiliki potensi besar untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor pangan di Indonesia, terutama dalam hal stabilitas pasokan dan harga. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan akses, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks dan multidimensi, yang memerlukan penanganan terpadu dan komprehensif. Untuk mengatasi kemiskinan, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi dan bersama-sama, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, serta meningkatkan pendapatan mereka, seperti menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Selain itu, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui regionalisasi bantuan sosial akan membantu memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang paling membutuhkan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Kerelawanan sosial masyarakat juga dapat menjadi sumber penting dalam pemberdayaan, serta pemecahan akar permasalahan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan sangat penting karena mereka memahami kondisi sosial-ekonomi di tingkat akar rumput dan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengurangi kemiskinan melalui kegiatan sosial dan ekonomi yang memberdayakan.

Pengentasan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting tidak hanya bagi pertumbuhan masyarakat, tetapi juga untuk pertumbuhan negara dan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara permanen agar orang yang terjerat kemiskinan dapat terbebas secara tuntas. Hal ini dapat dicapai melalui tindakan ekonomi yang menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan, serta tindakan kemanusiaan yang memberikan dukungan dasar bagi mereka yang membutuhkan.

Salah satu kebijakan yang dapat membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah dengan menyederhanakan kebijakan non-tarif komoditas pangan. Kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi pangan dan mengurangi biaya yang ditanggung oleh masyarakat, sehingga harga pangan menjadi lebih terjangkau. Selain itu, pemerintah juga dapat mengoptimalkan kebijakan pangan domestik, misalnya melalui peningkatan produktivitas pertanian lokal dan pengurangan ketergantungan pada impor pangan.

Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, tetapi masyarakat juga memegang peran kunci. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sangat penting agar pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif.

Salah satu aspek yang sangat terkait dengan pengentasan kemiskinan adalah ketahanan pangan, yang mencakup keadaan di mana setiap orang memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat strategis, karena tidak ada negara yang dapat berkembang secara stabil tanpa mencapainya. Ketahanan pangan yang terganggu dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi serta memicu gejolak sosial dan politik.

Pertanian berkelanjutan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan sekaligus melindungi lingkungan. Untuk memenuhi ketahanan pangan dalam upaya pengurangan kemiskinan, pemerintah dapat menggalakkan program pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan, serta pengembangan industri pangan lokal. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari luar negeri. Dengan demikian, kesejahteraan petani dan pengusaha pangan lokal dapat terjamin, yang pada gilirannya juga akan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor industri pangan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainunnisa, Vera and Wahyu Hidayat. 2019. Pengaruh Tingkat Pengangguran, Investasi, Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* 3(1):140–52.
- Anonimous, 2005, Membaca Petani Kajian Keanekaragaman Pangan dan Gizi, Krja sama LDD-KAJ dan Kom-PSE-KWI. Jakarta
- Barika, Ekaputri, R. A., Septriani, & Efendi. (2021). Analisis Struktur Ekonomi Di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Volume 4 Nomor 2.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and development*, 11(2), 196-202.
- Fitriana, N. E., & Qibthiyah, R. M. (2021). Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskis Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*.
- Florentin, Y. (2021). Analisis Perbandingan Program Kbantuan Langsung Tunai (Blt) Dengan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Rw 001 Kecamatan Jatisampurna. *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 4(1), 1-11.
- Forezagia, D.V. 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Vol.1,No.1 Desember 2018
- Hasan Muhammad, Murajid Ahmad, & Nurdina. (2022). Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *JE3S: Journal of Economic Education and Ebtterpreneurship Studies* 3(2)
- Mulyana dan Mardiyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan* 10(2)
- Muhammad, L. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal COMM-EDU*, 81-89.
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*, 22(3)
- Novilasari Sanjaya Pipit, Melia Sevti, & Arbian Pratama Syahfani, (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan, Keimpangan Pangan, dan Pengangguran Di Indonesia. *SALAM : Islamic Economics Journal*
- Piliang, M. Z. (2023). Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan, Dan Bantuan Sosial. *AtTanmiah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 262-284.

- Rasbin, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran: Studi Di Kota Yogyakarta dan Malang. *Kajian* 23(2)
- Rahmadi,S, dan Parmadi,P. (2019). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2)
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojonegoro. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 510-522.
- Rezky Utamie Izra, Chaminra Tipani, Taufik Ahmad, Dkk. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Di kabupaten Majane. *Journal Of Government Studies Volume 1, No.2*
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah Masalah Sosial*
- Safuridar, dan Novera Dwi Suci. (2017). Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. Universitas Samudra, Aceh 2017
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1)